

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh di Dinas Pendapatan Provinsi Riau maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor yang di tetapkan yang di mulai dari Wajib Pajak membawa persyaratan lengkap, pengisian formulir, pendaftaran, print data, pembayaran dan pengambilan STNK. Semua tahapan diatas sudah merupakan prosedur yang ditetapkan di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
2. Jumlah kendaraan berplat merah yang membayar pajak di Dinas Pendapatan Provinsi Riau setiap tahunnya terus menunnjukkan kenaikan tetapi kenaikan tersebut hanya sedikit.
3. Adanya hambatan seperti kurangnya koordinasi yang oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan pihak-pihak dari kepolisian sehingga para pengguna kendaraan berplat merah tidak terawasi dengan baik.
4. Hambatan lainnya yaitu masih banyak pihak pemerintah yang menggunakan kendaraan dinas tidak membayar pajak, sedangkan mereka menjadi panutan bagi masyarakat untuk taat dalam membayar pajak.

A. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembayaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak kendaraan bermotor berplat merah di Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat Wajib Pajak kendaraan bermotor berplat merah, kiranya perlu dicarikan formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berplat merah.
2. Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau perlu dilakukan penambahan loket-loket pembayaran atau kasir sehingga tidak terjadi penumpukan/antrian yang terlalu banyak.
3. Meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor berplat merah yang harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendapatan Provinsi Riau dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak yang optimal dan sistem pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.
4. Sebagai pihak pemerintah yang menggunakan kendaraan bermotor berplat merah harusnya lebih taat lagi dalam membayar pajak sehingga tidak terjadi lagi tunggakan pajak dan dapat menjadi panutan yang baik dalam masyarakat.
5. Untuk mengatasi terjadinya penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor berplat merah maka perlu dilakukan hubungan kerja sama yang baik dengan pihak terkait seperti Polisi dan Dinas Perhubungan.